



SIDANG TAHUNAN KE-14 CPPCC DI BEIJING

Presiden Xi Jinping (depan, kedua kanan) menghadiri pembukaan sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) ke-14 di Balai Agung Rakyat, Beijing, Tiongkok, Senin (4/3). Anggota CPPCC terdiri dari perwakilan masyarakat yang dipilih melalui konsultasi dan rekomendasi dari berbagai lapisan masyarakat seperti pengusaha, kelompok agama, etnis minoritas hingga selebritas, dan mereka bukan politisi.

Korsel Mulai Beri Sanksi Atas Aksi Mogok Ilegal Dokter Magang

9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari.

SEOUL(IM)- Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan pemerintah berencana mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang. Mereka yang melanggar perintah diminta untuk kembali bekerja.

Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin (4/3), memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai

tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.

"Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang," kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.

"Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali

bekerja," tambahnya.

Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menanggulangi izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut tidak dapat dibatalkan.

Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja,

dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.

Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja. "Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip," kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.

"Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor

medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera," ujar dia.

Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhi.

Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.

Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp 353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut. ● tom

WHO: Anak-anak Mati Kelaparan di Gaza Utara

GAZA(IM) - Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan anak-anak meninggal karena kelaparan di Gaza Utara.

Dia menjelaskan kunjungan badan tersebut pada akhir pekan ke rumah sakit (RS) Al-Awda dan Kamal Adwan adalah yang pertama sejak awal Oktober.

Dalam sebuah postingan di media sosial, dia berbicara tentang 'temuan suram' dalam kunjungannya itu. Dia menulis jika kurangnya makanan mengakibatkan kematian 10 anak dan kekurangan gizi yang parah, gedung rumah sakit hancur.

Dr Tedros melaporkan malnutrisi tingkat parah, anak-anak sekarat karena kelaparan, kekurangan bahan bakar, makanan dan pasokan medis, gedung rumah sakit hancur di Gaza utara, di mana diperkirakan 300.000 orang hidup dengan sedikit makanan atau air bersih.

"Kurangnya makanan mengakibatkan kematian 10 anak," tulisnya di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dikutip BBC.

Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi WHO dalam beberapa bulan terakhir, walaupun pihaknya berupaya untuk mendapatkan akses yang lebih teratur ke bagian utara Gaza.

"Situasi di Rumah Sakit Al-Awda sangat memprihatinkan, karena salah satu bangunannya hancur," tulisnya.

Kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza melaporkan pada Senin (4/3) bahwa setidaknya 15 anak meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi di rumah sakit Kamal Adwan.

Kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan pada Senin (4/3) jika

seorang anak ke-16 meninggal pada Minggu (3/3) di sebuah rumah sakit di kota selatan Rafah.

Penduduk Gaza bertahan hidup dari pakan ternak dan beras karena makanan semakin berkurang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan lalu memperingatkan bahwa kelaparan di Gaza hampir tidak bisa dihindari.

Seorang pejabat senior bantuan PBB memperingatkan bahwa setidaknya 576.000 orang di Jalur Gaza, seperempat dari populasi, menghadapi tingkat kerawanan pangan yang sangat parah dan satu dari enam anak di bawah usia dua tahun di wilayah utara menderita kekurangan gizi akut.

Direktur regional badan anak-anak PBB, Unicef, Adele Khodr mengatakan kematian anak-anak yang kami khawatirkan terjadi di sini, karena kekurangan gizi melanda Jalur Gaza.

"Kematian tragis dan mengerikan ini disebabkan oleh ulah manusia, dapat diprediksi dan sepenuhnya dapat dicegah," terangnya dalam sebuah pernyataan pada Minggu (3/3).

Militer Israel melancarkan kampanye udara dan darat skala besar untuk menghancurkan Hamas yang dilarang sebagai organisasi teroris oleh Israel, Inggris, AS dan lainnya, setelah kelompok bersenjata tersebut membunuh sekitar 1.200 orang di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 dan memakan korban 253 orang, kembali ke Gaza sebagai sandera.

Lebih dari 30.500 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh di Gaza sejak saat itu, menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut. ● tom

Pernikahan di Korea Selatan Anjlok 40 Persen Selama 10 Tahun Terakhir

SEOUL(IM) - Jumlah pernikahan di Korea Selatan anjlok sebanyak 40 persen selama 10 tahun terakhir. Hal itu menyebabkan penurunan angka kelahiran di negara tersebut.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Statistik Korea, sebanyak 193.673 pernikahan dilaporkan pada tahun lalu. Jumlah ini turun tajam dari 322.807 kasus pada tahun 2013.

Jumlah pernikahan pada tahun 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan 191.690 pernikahan yang dilaporkan pada tahun 2022. Akan tetapi jumlah pernikahan tahunan tersebut menurun selama 11 tahun berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2022.

Menurut survei yang dilakukan oleh Statistics Korea, hanya 15,3 persen dari mereka yang berusia 13

tahun ke atas mengatakan "pernikahan adalah suatu keharusan" pada tahun 2022, turun dari angka yang sama sebesar 20,3 persen pada 10 tahun lalu.

Proporsi mereka yang menjawab "menikah lebih baik" juga turun menjadi 34,8 persen, dari 42,4 persen pada periode yang sama.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen dari mereka yang berusia 20-an atau 30-an menyebutkan "kekurangan uang" sebagai alasan mereka tidak menikah.

Sekitar 19 persen dan 14 persen dari mereka yang berusia 20-an dan 30-an mengatakan mereka "tidak merasa perlu" untuk menikah.

Lebih sedikitnya pernikahan juga menyebabkan penurunan tingkat kesuburan negara tersebut dalam be-

berapa tahun terakhir, karena kebanyakan orang di Korea Selatan melahirkan bayi setelah mereka menikah.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Statistik Korea, jumlah bayi baru lahir di Korea Selatan turun selama delapan tahun berturut-turut pada tahun 2023 menjadi 230.000, turun 47,3 persen dari 436.455 pada tahun 2013.

Tingkat kesuburan total di Korea Selatan jumlah rata-rata anak yang diharapkan dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang hidupnya turun ke titik terendah sepanjang sejarah kuartalan sebesar 0,65 pada periode Oktober-Desember tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat penggantian sebesar 2,1 yang akan menjaga populasi Korea Selatan tetap stabil di angka 51 juta. ● tom

43 Negara Tuntut Penyelidikan Internasional Atas Kematian Alexei Navalny

MOSKOW(IM) - Sebanyak 43 negara menuntut penyelidikan internasional independen atas kematian pemimpin oposisi Rusia, Alexei Navalny. Mereka menyebut Presiden Vladimir Putin memikul tanggung jawab utama.

Anggota-anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia termasuk di antara negara-negara yang menyerukan kemarahan atas kematian Navalny di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Navalny (47), yang meninggal di koloni penjara Arktik, dimakamkan di Moskow pada hari Jumat lalu, dikelilingi oleh kerumunan pelayat yang meneriakan namanya.

"Kami marah atas kematian politisi oposisi Rusia Alexei Navalny, yang tanggung jawab utamanya berada di tangan Presiden Putin dan otoritas Rusia," kata Duta Besar Uni Eropa Lotte Knudsen kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB atas nama 43 negara, seperti dikutip dari kantor berita AFP, Selasa (5/3).

"Rusia harus mengizinkan penyelidikan internasional yang independen dan transparan menge-

nai kematian mendadak tersebut, yang dipandang sebagai tanda lain dari percepatan dan penindasan sistematis di Rusia," tambahnya.

Negara-negara tersebut mengatakan mereka sangat prihatin dengan "tindakan keras sistematis terhadap masyarakat sipil".

Mereka mendesak Rusia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan semua tahanan politik, pembela hak asasi manusia, jurnalis dan aktivis anti-perang yang ditahan karena menjalankan hak asasi mereka secara damai dan karena menentang perang Rusia di Ukraina.

"Kami menyerukan kepada Federasi Rusia untuk mengakhiri iklim impunitas ini dan menciptakan lingkungan yang aman bagi oposisi politik dan suara-suara kritis," demikian pernyataan bersama 43 negara tersebut.

"Kepemimpinan dan otoritas politik Rusia harus dimintai pertanggungjawaban," kata Knudsen.

"Keberanian, pengorbanan, dan komitmen tak tergoyahkan Navalny terhadap keadilan, kebebasan, dan demokrasi tidak akan pernah terlupakan," tandasnya. ● tom

Mahkamah Agung AS Putuskan Colorado Tak Bisa Larang Donald Trump Ikuti Pilpres

COLORADO(IM) - Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) telah membatalkan upaya masing-masing negara bagian untuk mendiskualifikasi Donald Trump dari pencalonan presiden dengan menggunakan klausul konstitusi anti-pemberontakan.

Keputusan dengan suara bulat ini khusus berlaku di Colorado, namun juga mengesampingkan tantangan yang diajukan di negara bagian lain.

Colorado diketahui telah melarang Trump mengikuti pemilihan pendahuluan Partai Republik, dengan alasan dia menghasut kerusuhan Capitol pada 2021.

Pengadilan memutuskan bahwa hanya Kongres, bukan negara bagian, yang mempunyai kekuasaan tersebut.

Keputusan pengadilan tinggi membuka jalan bagi Trump untuk berkompetisi dalam pemilihan pendahuluan di Colorado yang dijadwalkan pada Selasa (5/3).

Trump adalah kandidat terdepan untuk nominasi Partai Republik dan tampaknya akan menghadapi pertarungan ulang dengan Presiden asal Demokrat Joe Biden dalam pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada November mendatang.

Pada Senin (4/3), mantan presiden tersebut segera mengklaim kemenangan setelah keputusan tersebut, melalui platform media sosial Truth.

Dia mengklaim kemenangan itu sebagai 'kemenangan besar bagi Amerika'. Pesan tersebut diikuti dengan email penggalangan dana yang dikirimkan kepada pendukung kampanyenya.

Berbicara dari kediamannya di Mar-a-Lago, Florida, segera setelah itu, dia mengatakan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan sangat baik dan akan sangat membantu dalam menyatukan negara kita, yang memang dibutuhkan. "Anda tidak bisa mengeluarkan seseorang dari pencalonan karena lawannya akan menginginkan hal itu," ujarnya, dikutip BBC.

Sementara itu, Men-

teri Luar Negeri Colorado, Jena Griswold, mengatakan bahwa dia kecewa dengan keputusan tersebut dan bahwa Colorado seharusnya dapat melarang pemberontakan yang melanggar sumpah dalam pemungutan suara.

Selain itu, kelompok pengawas yang mengajukan kasus ini di Colorado, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew), mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa meskipun pengadilan gagal memenuhi momen tersebut, namun hal ini masih merupakan kemenangan bagi demokrasi karena Trump akan tercatat dalam sejarah sebagai seorang pemberontak.

Maine dan Illinois mengikuti jejak Colorado dalam mengeluarkan Trump dari pemilu dengan alasan yang sama.

Upaya yang dilakukan di kedua negara bagian tersebut ditunda sementara tuntutan terhadap keputusan Colorado ditingkatkan ke Mahkamah Agung.

"Kami menyimpulkan bahwa negara bagian dapat mendiskualifikasi orang yang memegang atau mencoba memegang jabatan negara," demikian pendapat pengadilan.

"Tetapi berdasarkan Konstitusi, negara bagian tidak mempunyai wewenang untuk menegakkan Pasal 3 sehubungan dengan jabatan federal, khususnya kepresidenan," lanjutnya.

Sembilan hakim memutuskan bahwa hanya Kongres yang dapat mengesahkan ketentuan Amandemen ke-14 terhadap pejabat dan kandidat federal.

Bagian dari amandemen era Perang Saudara, yakni Bagian 3, melarang pejabat federal, negara bagian dan militer yang terlibat dalam pemberontakan atau pemberontakan terhadap AS untuk memegang jabatan lagi.

Kelompok-kelompok termasuk Free Speech For People berpendapat bahwa upaya untuk menunda peralihan kekuasaan secara damai pada 6 Januari 2021 sesuai dengan definisi pemberontakan yang diuraikan dalam amandemen tersebut. ● tom



PENGAMBILAN SUMPAH SHAHBAZ SHARIF SEBAGAI PM PAKISTAN KE-24

Presiden Pakistan Arif Alvi (kanan) mengambil sumpah jabatan Perdana Menteri Shahbaz Sharif yang baru terpilih di Gedung Presiden di Islamabad, ibu kota Pakistan, Senin (4/3). Sharif diambil sumpahnya sebagai PM Pakistan terpilih ke-24.